



Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres (dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Apa Peran Sawit dalam Agenda Iklim Prabowo?

Pemerintah gencar menyuarakan agenda iklimnya di berbagai forum internasional. Prabowo tercatat menyampaikan itu pada kesempatan G20, APEC, serta pertemuannya dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo bahkan mengutarakan bahwa Indonesia ingin mencapai *net zero emissions* sebelum tahun 2050. Sawit sebagai minyak nabati bahan produksi biodiesel yang dapat menyokong tercapainya energi hijau memiliki peran strategis. Rencana besar pemerintah mewujudkan *net zero emission* agar lebih cepat antara lain dengan pemanfaatan biodiesel adalah opsi paling *visible*. Biodiesel dari sawit sejauh ini satu-satunya yang telah menunjukkan bukti nyata.

**Selengkapnya di halaman 4*

Maha Penting Integrasi Data Kelapa Sawit di Indonesia

Tanpa integrasi data yang memadai, berbagai klaim negatif terkait industri kelapa sawit kerap muncul dan memicu perdebatan. Salah satu isu utama adalah tuduhan bahwa banyak lahan kelapa sawit merupakan hasil deforestasi dari kawasan hutan lindung. Dalam kondisi seperti ini, data yang terintegrasi menjadi sangat penting. Selain mampu menunjukkan fakta yang objektif di lapangan, data tersebut juga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan transparansi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Selengkapnya di halaman 5*

BPDPKS Jadi BPDP: Dampaknya Apa?

Pemerintah menyatakan bahwa saat ini produktivitas kakao dan kelapa sangat rendah. Transformasi BPDPKS menjadi BPDP diharapkan agar keberlanjutan kedua produk kelapa dan kakao tidak tertinggal jauh dari kelapa sawit, mengingat perannya yang sama-sama signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun faktanya, memang luas lahan kakao dan kelapa yang berstatus Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) sangat tinggi apabila dibandingkan dengan sawit. Kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut, karena bila tidak tepat malah justru berisiko memperlemah posisi sawit yang saat ini menjadi tulang punggung perkebunan.

**Selengkapnya di halaman 11*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Terdapat banyak opsi kebijakan untuk memajukan industri perkebunan tanah air secara keseluruhan. Kehati-hatian dalam meregulasi mutlak diperlukan demi terjaminnya keberlangsungan. Meski semua pihak tampak bersuara bulat untuk memperjuangkan, namun pada praktiknya antara satu dengan lainnya kerap berbeda. Masih banyak hal yang perlu kita usahakan agar cita-cita bersinarnya komoditas perkebunan Indonesia dapat tercapai. Selamat membaca IPOSS News Edisi Kedelapan.

Menurut Riset: Generasi Muda Paling Rentan Hoaks Kelapa Sawit



Ilustrasi GenZ yang memakai produk turunan kelapa sawit (*skincare*) (dok. sisi+)

Anggapan bahwa generasi tua yang kurang memahami teknologi digital dan lebih mudah terjebak dalam berita hoaks ternyata tidak sepenuhnya tepat. Beberapa studi justru menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Dalam hal persepsi terhadap kelapa sawit, generasi muda juga dinilai lebih mudah terpengaruh oleh kampanye negatif.

Penelitian yang dilakukan tahun 2023, sebagaimana dilansir dari Kompas.id (10/07/2023) menemukan bahwa anak muda memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan orang yang lebih tua dalam hal mengenali berita palsu. Hasil ini diperoleh melalui serangkaian eksperimen yang dilakukan dengan *Misinformation Susceptibility Test* (tes kerentanan terhadap misinformasi) yang dikembangkan oleh psikolog di University of Cambridge. Dalam eksperimen tersebut, para peneliti menciptakan kuis berdurasi dua menit yang meminta partisipan untuk mengidentifikasi 20 artikel sebagai fakta atau hoaks.

Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa 36 persen individu berusia 65 tahun ke atas berhasil meraih skor tinggi (lebih dari 16 artikel yang teridentifikasi benar), sedangkan hanya 9 persen dari kelompok tersebut yang mendapat skor rendah (10 artikel atau kurang yang teridentifikasi benar). Sebaliknya, di kalangan usia 18-29 tahun, hanya 11 persen yang berhasil mencapai skor tinggi, sementara 36 persen masuk dalam kategori skor rendah.

Sejalan dengan hasil tes kerentanan terhadap misinformasi, survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center bersama

Kominfo bertajuk “Status Literasi Digital di Indonesia 2021” juga mengungkap bahwa generasi muda memang memiliki tingkat literasi digital lebih tinggi dibandingkan generasi tua. Namun, tingkat literasi yang lebih tinggi tersebut tidak menjamin mereka terbebas dari pengaruh hoaks. Kehidupan yang sepenuhnya digital sejak usia dini, terutama melalui media sosial, memberikan dampak besar pada cara berpikir dan emosi generasi muda, di mana preferensi mereka sering kali dipengaruhi oleh algoritma media sosial.

Sebagai produsen utama minyak kelapa sawit dunia, Indonesia sering menjadi target kritik, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa hal ini sebenarnya lebih berkaitan dengan persaingan produk minyak nabati di pasar global. Beberapa negara yang menjadi pesaing, dengan dukungan dari sejumlah LSM lingkungan, diketahui secara aktif melakukan kampanye negatif terhadap minyak sawit. Berdasarkan hasil penelitian, generasi muda yang merupakan pengguna media sosial secara aktif menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh kampanye semacam ini.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan literasi masyarakat, termasuk dengan menyebarkan data-data akurat yang bertentangan dengan berbagai hoaks tentang sawit yang beredar. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengajak generasi muda agar dapat memahami minyak sawit secara lebih objektif dan menghindari penyebaran informasi yang salah terkait komoditas perkebunan ini. (AM)

Mengapa Sawit Melenggang di Kanada?



Ilustrasi bendera Kanada (dok.Unsplash)

Ketika beberapa negara Eropa mencoba mengganjal sawit Indonesia, Kanada justru membuka pintu lebar-lebar. Tidak tanggung-tanggung, negeri berlogo daun maple itu membebaskan tarif bea masuk sehingga sawit Indonesia akan relatif mudah memasuki pasar disana. Mengapa Kanada bersikap berbeda?

Berita baik itu datang setelah Misi Perdagangan Tim Kanada (TCTM) melakukan diskusi intens dengan partnernya dari Pemerintah Indonesia di Hotel Mulia Senayan (2/12/24). Kedua belah pihak berhasil menyelesaikan perjanjian kerjasama kedua negara yang disebut dengan *Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership* (ICE-CEPA) dimana di dalamnya dicantumkan beberapa komoditas yang akan dibebaskan dari tarif bea masuk ke “negeri pecahan es” tersebut mulai awal tahun depan (2026).

“Manfaat yang diperoleh Indonesia melalui Indonesia-Kanada CEPA yang pertama perdagangan barang mendapat liberalisasi hingga 90,5 persen dari total tarif yang masuk ke Kanada dengan nilai perdagangan US\$ 1,4 miliar,” ujar Menteri Perdagangan, Budi Santoso sebagaimana dilansir laman Tempo (3/12/24).

Pengusaha dan khususnya petani sawit Indonesia sedikit bernapas lega. Setelah kisaran 6 bulan perasaan dan pikiran mereka teraduk-aduk dengan rencana aturan EUDR yang akan mengganjal komoditas sawit, khususnya bagi pemilik lahan yang dikategorikan merambah hutan, terdapat secercah harapan untuk mendapatkan pasar baru di bagian utara benua Amerika itu. Acungan jempol layak dialamatkan kepada tim negosiasi Indonesia yang sangat peka terhadap kebutuhan dan nasib para petani sawit.

Namun demikian, kalau benar nantinya EUDR diterapkan, dapatkah ekspor sawit yang mestinya dikirim ke Eropa dialihkan ke negeri daun maple? Menurut catatan, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2023 lalu

sebesar 3,70 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,13 juta ton. Bahkan hampir sepanjang tahun ini, permintaan minyak sawit Indonesia dari luar negeri cenderung mengalami penurunan, kecuali di beberapa bulan menjelang akhir tahun 2024.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono (Bisnis Indonesia 4/12/24), impor minyak sawit Kanada sepanjang 2024 (sampai dengan September), hanya sebesar 17,348 ton, atau masih sangat jauh dibandingkan dengan serapan dari Eropa. Keberanian Kanada untuk membuka pintu lebar-lebar bagi minyak sawit, selain harganya yang kini sedang membumbung tinggi, juga karena Kanada adalah negara penghasil canola terbesar di dunia. Perimbangan harga yang demikian, kemungkinan besar membuat minyak sawit Indonesia tidak akan mampu memberikan pengaruh signifikan di pasar Kanada.

Eddy mengharapkan, pemerintah ke depannya dapat terus membuka pasar baru, selain meningkatkan dan menjaga ekspor ke pasar tradisional seperti China, India, Uni Eropa, dan Pakistan.

Pelajaran terpenting yang mungkin bisa dipetik dari melenggangnya sawit ke Kanada ini, bahwa negara maju manapun akan memiliki perhitungan yang cukup dalam untuk memberikan insentif perdagangan. Pada akhirnya, yang ingin dicapai adalah *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak.

Di sisi lain, memasuki pasar-pasar baru, terus dan perlu diusahakan tanpa mengenal lelah walau hanya mampu menyerap komoditas Indonesia dalam jumlah yang terbatas. Kita mesti terus berpegang pada peribahasa kuno: sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Untung sedikit kalau di banyak tempat (terdapat 195 negara di dunia), akhirnya juga bisa menumpuk sebesar gunung. (AM)

Sawit Dalam Bingkai Agenda Iklim Prabowo



Presiden Prabowo Subianto dengan Sekjen PBB Antonio Guterres (dok. presidenri.go.id)

Pemerintahan Prabowo tampak optimis dengan rencana besarnya terkait isu penanganan perubahan iklim. Presiden meyakini Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat menjalankan program hijau untuk mengurangi emisi karbon dengan penggunaan energi terbarukan. Ia antara lain menyebutkan potensi besar dari *geothermal*, *hydro*, tenaga surya, dan bioenergi dapat membawa negeri ini menuju transisi ke energi yang lebih bersih.

Pemerintah kerap menggaungkan agenda iklimnya di berbagai forum internasional. Prabowo tercatat menyampaikan itu pada kesempatan G20, APEC, serta pertemuannya dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo pada Konferensi Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, bahkan mengutarakan bahwa Indonesia ingin mencapai *net zero emissions* sebelum tahun 2050 salah satunya dengan meningkatkan penggunaan bioenergi.

Saat ini Indonesia memang boleh dibilang sebagai kampiun biodiesel yang merupakan salah satu jenis bahan bakar bioenergi. Berdasarkan catatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Indonesia merupakan negara yang mencampurkan biodiesel ke dalam solar dengan persentase tertinggi di dunia. Indonesia pada tahun 2015 telah memulai mencampurkan 15% biodiesel sawit dengan solar (B15). Kemudian tahun 2023 lalu pencampurannya sudah mencapai 35% (B35). Malaysia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua baru memulai bauran itu pada tahun 2019 dengan besaran 10%.

Pada tahun 2023, BPDP juga mencatat pemanfaatan biodiesel Indonesia sebesar 54,42 juta kilo liter sehingga berhasil menurunkan impor solar dan menghemat devisa sebesar Rp 404,32 triliun. Kebijakan B35 yang resmi diberlakukan 1 Februari 2023 itu diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO₂. Artinya biodiesel bukan hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan RI, Ardi Praptono, dalam sebuah video wawancara dengan CNBC (9/12) mengungkapkan pentingnya industri sawit sebagai penyedia energi terbarukan melalui produksi biodiesel dari bahan baku minyak nabati. Menurutnya biodiesel yang berasal dari energi terbarukan secara pasti dapat mendukung transisi energi yang ramah lingkungan. Penggunaan biodiesel akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada upaya pemerintah untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Upaya transisi hijau pemerintah dengan meningkatkan penggunaan biodiesel juga tidak luput dari kritik pegiat lingkungan. Dikutip dari channel news asia (26/11), Greenpeace Indonesia berpandangan bahwa peningkatan penggunaan biodiesel dapat menyebabkan peningkatan deforestasi. Menurut Greenpeace penggunaan biodiesel adalah salah satu penyebab deforestasi di hutan hujan Amazon Brasil yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Pihaknya tidak menginginkan hal serupa menimpa Indonesia.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo perlu tetap menjaga keseimbangan dalam mengupayakan transisi energi hijau. Meski industri sawit mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dan ketahanan energi, keberlanjutan sektor ini tetap harus dijaga aturan yang bijak. Melalui pendekatan yang holistik, Indonesia dapat mewujudkan visi transisi energi hijau yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Rencana besar pemerintah mewujudkan *net zero emission* lebih cepat antara lain dengan pemanfaatan energi hijau dari sawit adalah opsi paling *visible*. Biodiesel dari sawit sejauh ini satu-satunya yang telah memberikan bukti nyata. Hal berikutnya yang menentukan adalah bagaimana kompleksitas peningkatan bauran biodiesel ke prosentase lebih tinggi dapat dikelola secara tepat. (AM)

Pentingnya Integrasi Data Kelapa Sawit di Indonesia



Ilustrasi integrasi data kelapa sawit di Indonesia (dok. Ai)

Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki peran strategis dalam pasar minyak nabati global. Namun, kurangnya integrasi data menjadi tantangan utama dalam pengambilan kebijakan guna memaksimalkan potensi sektor kelapa sawit. Sebab, eksistensi industri kelapa sawit di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, adanya sistem data yang terintegrasi dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit di masa depan.

Tanpa integrasi data yang memadai, berbagai klaim negatif terkait industri kelapa sawit kerap muncul dan memicu perdebatan. Salah satu isu utama adalah tuduhan bahwa banyak lahan kelapa sawit merupakan hasil deforestasi dari kawasan hutan lindung. Namun, klaim semacam ini sering kali tidak didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi. Ketidakpastian data ini tidak hanya merugikan citra industri kelapa sawit Indonesia di pasar global, tetapi juga menyulitkan pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki praktik pengelolaan lahan.

Dalam kondisi seperti ini, data yang terintegrasi menjadi sangat penting. Selain mampu menunjukkan fakta yang objektif di lapangan, data tersebut juga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan transparansi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hingga kini, data kelapa sawit di Indonesia tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Beberapa inisiatif telah diupayakan, seperti sertifikasi ISPO yang didalamnya terdapat prinsip transparansi dan pengembangan sistem informasi berbasis digital. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan dari berbagai sisi.

Ada beberapa kendala dalam mewujudkan integrasi data kelapa sawit. Pertama, belum adanya infrastruktur data yang kuat, valid dan mengikat sehingga data dapat terkumpul

dari level terkecil yakni petani dan pengusaha di sektor hulu hingga ke hilir. Kedua, belum adanya kerangka kebijakan yang mendukung, dan ketiga belum adanya lembaga yang ditunjuk khusus untuk memastikan seluruh data-data yang tersebar di berbagai kementerian dan Lembaga dapat terintegrasi. Keempat, keterbatasan anggaran biaya untuk pembangunan, pemeliharaan dan implementasi sistem terintegrasi.

Untuk mewujudkan integrasi data yang efektif, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup:

- **Pembangunan Platform Nasional;** Platform ini akan menjadi pusat informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit.
- **Digitalisasi Pengumpulan Data;** Penggunaan teknologi seperti GIS dapat mempermudah pemetaan dan pemantauan lahan secara akurat.
- **Badan Inisiator Integrasi Data Lintas Sektor;** Perlu ada badan yang bisa menginisiasi agar ada kerja sama terkait data kelapa sawit antara pemerintah, perusahaan, dan petani.
- **Peningkatan Literasi Digital;** Edukasi bagi petani kecil harus diprioritaskan agar mereka mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
- **Penegakan Regulasi;** Pemberlakuan standar pengelolaan data beserta penagakannya dengan regulasi untuk memastikan transparansi dan akurasi di semua tingkatan.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat daya saing nasional di pasar kelapa sawit global sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. (FGK)

Strategi Menjaga Komoditas Perkebunan Agar Tidak Menjadi Kenangan

Kita Bangsa Indonesia atau dahulu Nusantara sudah memiliki banyak pengalaman tentang berbagai komoditas yang menjadi unggulan yang kini hanya tinggal kenangan. Bagaimana dahulu berharganya rempah-rempah, misalnya biji pala dari Kepulauan Banda yang bahkan 1 pon nya dihargai sekitar 7 ekor sapi gemuk , atau ada juga yang menyebutkan 1 genggam biji pala senilai segenggam emas. Bahkan, Pulau Run di tengah Laut Banda yang dikuasai Inggris dipertukarkan dengan Manhattan di New York yang saat itu dikuasai Belanda. Kemudian kita punya teh, bahkan Observatorium Bosscha dibangun karena saat itu the sedang Berjaya. Masih banyak kenangan tentang berbagai Komoditas lainnya, seperti Gula yang mengantarkan Ong Tjong Ham raja gula dari Jawa menjadi konglomerat terkaya di Asia Tenggara pada jamannya.

Saat ini kita memiliki salah satu komoditas unggulan, atau lebih tepatnya satu-satunya komoditas unggulan Perkebunan yaitu Kelapa Sawit yang apabila ditinjau dari berbagai aspek memiliki manfaat multi dimensi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkait dengan perkelapasawitan yang berkisar 17 juta jiwa, keluarga petani yang menggantungkan kehidupannya dari Perkebunan kelapa sawit lebih dari 2,6 juta kepala keluarga, kontribusi kepada APBN 2023 mencapai Rp 88 triliun serta kontribusi kepada PDB berkisar 3,5% . Belum lagi aspek lain, seperti penghematan impor bahan bakar minyak akibat minyak sawit juga merupakan sumber energi terbarukan, manfaatnya dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, kontribusi positif bagi efisiensi penggunaan lahan akibat produktivitasnya yang tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya dan masih banyak manfaat lainnya.

Dibalik sederet manfaat yang ada serta kesuksesan yang dimiliki komoditas kelapa sawit, ternyata kelapa sawit banyak menghadapi ancaman sebagai akibat perang dagang dari berbagai negara, khususnya yang merasa terancam komoditas unggulannya dengan berbagai macam keunggulan kelapa sawit, terlebih dari sisi produktivitas atau efisiensi penggunaan lahannya kelapa sawit tidak terkalahkan. Banyak stigma negatif yang disematkan kepada industri perkelapasawitan yang dapat mengancam keberlanjutannya. Untuk itu diperlukan sebuah strategi dalam bentuk berbagai kebijakan yang tepat agar dapat menjaga keberlanjutan Industri perkelapasawitan sebagai komoditas unggulan yang mempunyai efek multi dimensi.

Salah satu bentuk strategi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dapat dilihat saat pembentukan BPDP d/h



Ilustrasi produk Minyak Sawit (dok.Humas Setneg)

BPDPKS, pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan berbagai program seperti pembiayaan selisih harga biodiesel terbukti mampu mendorong penggunaan biodiesel dalam negeri, sehingga harga CPO Internasional kembali berada pada harga keekonomian. Dampaknya kontribusi kepada APBN meningkat, kesejahteraan petani meningkat dll. Demikian halnya dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dibiayai oleh BPDPKS, meskipun belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, akan tetapi sekurang-kurangnya telah turut mendorong adanya upaya PSR. Keberhasilan PSR diharapkan nantinya mampu meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang akan sangat penting untuk mendukung berbagai program pemerintah seperti kemandirian pangan dan energi, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi dll.

Pilihan strategi untuk memastikan bahwa komoditas kelapa sawit akan terus menjadi komoditas unggulan dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan yang mendukung, seperti strategi peningkatan produktivitas untuk peningkatan produksi sekaligus memberikan pesan positif kepada lingkungan, strategi hilirisasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan serta mendorong nilai tambah yang tinggi, serta strategi menjaga harga CPO Internasional agar tetap pada nilai keekonomiannya, sehingga akan terus menjaga daya saing produk minyak sawit dan turunannya dibandingkan minyak nabati lainnya. (HN)

Strategi Peningkatan Produksi Sawit Nasional Menyongsong Implementasi B40



Ilustrasi pekerja kebun sawit memanen TBS (dok. Kemenkeu RI)

Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan Indonesia-Brazil Business Forum pada 17 November 2024 mengumumkan rencana peningkatan bauran biodiesel Indonesia menjadi 40% (B40) pada 2025. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi karbon. Namun, pencapaian target besar ini menghadirkan tantangan besar pula, terutama di tengah tren stagnasi produksi kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir.

Di tengah terbatasnya ruang ekspansi kebun sawit, produksi kelapa sawit Indonesia saat ini rentan menghadapi fluktuasi produksi. Terlebih akibat perubahan iklim, seperti fenomena El Niño. Menurut PPKS, El Niño berdampak pada berkurangnya curah hujan yang dapat menimbulkan cekaman kekeringan pada sawit. Akibat kekeringan tersebut, dalam jangka pendek (1-6 bulan), sebagian buah mengalami abortus sehingga gagal dipanen. Dampak lainnya adalah keterlambatan matang buah, di mana periode pematangan buah yang seharusnya 6 bulan menjadi 7 hingga 8 bulan.

Sebagaimana dilaporkan oleh BMKG, fenomena El Niño telah terjadi di Indonesia sejak semester II 2023 hingga semester I 2024 ini. Dampak El Niño ini cukup signifikan. Produksi CPO tahun 2024 dilaporkan turun sebesar 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tercatat capaian produksi CPO s.d September 2024 adalah 35,5 juta ton sedangkan dengan periode yang sama tahun 2023 mencapai 37,3 juta ton. Kondisi ini masih dapat tertekan hingga penutupan tahun akibat adanya gangguan iklim.

Penting untuk menjadi perhatian dampak iklim El Niño ini, karena menyebabkan terjadinya penurunan produksi CPO di tengah rencana peningkatan mandat biodiesel dari B35 menjadi B40. Terbatasnya luas lahan sawit dan belum maksimalnya upaya intensifikasi membuat upaya peningkatan produksi CPO menjadi sulit tercapai, ditambah adanya dampak iklim seperti El Niño.

Untuk itu, dalam menyongsong implementasi B50, pemerintah perlu memberikan perhatian pada peningkatan produksi CPO nasional agar keseimbangan alokasi dapat tetap terpenuhi dengan tidak mengurangi pendapatan BPDP dari pungutan ekspor. Sehingga pembiayaan program biodiesel dan pembiayaan lainnya seperti PSR, kampanye sawit baik, riset, dan program lainnya tidak terganggu.

Jika ekstensifikasi lahan tidak dapat ditempuh, maka fokus pada intensifikasi adalah pilihan yang tak terelakkan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas sawit yakni, peremajaan seluas 3-4% dari total lahan sawit rakyat dan perusahaan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Masalahnya, peremajaan sawit rakyat yang sudah diprogramkan ternyata berjalan perlahan, di mana capaiannya kurang dari 30% dibanding target. Di sisi lain, lahan sawit rakyat yang mencakup sekitar 40% dari total lahan sawit nasional, perlu ditingkatkan produktivitasnya dari 3,4 ton CPO per hektar menjadi 6 ton per hektar melalui program peremajaan dan penerapan GAP, yang diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan produktivitas.

Bagi petani sawit rakyat, upaya peningkatan produksi ini bagai mimpi, sebab tanpa adanya program pendampingan yang efektif dan kemitraan yang strategis niscaya program PSR ini sulit memberikan hasil yang diharapkan. Untuk itu, program kemitraan perusahaan seperti yang PIS-AGRO dapat diusulkan untuk diterapkan. Melalui kemitraan dalam program PIS-AGRO, petani dapat mengakses teknologi dan praktik terbaik secara lebih luas dengan bentuk pendampingan dari perusahaan sebagai lead program.

Pola PIS-AGRO juga dapat mengatasi kompleksitas program PSR. Pembentukan lembaga terpusat dapat menjadi solusi dengan model kepemimpinan yang tepat sehingga program PSR dapat terlaksana lebih terkontrol baik dari sisi biaya maupun mutu pekerjaan dan hasil peremajaan. Konsep ini, seperti model PIR-Trans dalam program transmigrasi, dimana pengelolaan program dilakukan oleh satu lembaga agar lebih terstruktur, sehingga pemantauan menjadi lebih efektif, identifikasi dan penyelesaian masalah juga dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Melalui pengelolaan PSR yang lebih baik, diharapkan produktivitas dapat meningkat sehingga target produksi untuk memenuhi B40 dapat tercapai tanpa mengorbankan sektor pangan, industri kimia maupun ekspor. (DS)

Tantangan EUDR bagi Perkebunan ?



Gedung Parlemen Uni Eropa (dok. PlxaBay)

Penundaan Peraturan Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) oleh Komisi Uni Eropa, akhirnya diputuskan Parlemen Eropa. Setidaknya Perusahaan dan petani dapat bernafas sedikit lebih lega, mengingat batas waktu yang diundurkan menjadi 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk petani. Pasalnya, dengan adanya penundaan ini, diharapkan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pemenuhan persyaratan yang diatur di dalam EUDR yang dianggap cukup membebani industri kelapa sawit nasional.

Masalahnya, belum saja diterapkan, peraturan ini telah menimbulkan gejolak pasar. Berdasarkan *dashboard* ekspor BPS, volume ekspor sawit Indonesia ke Eropa telah menurun sejak rencana penerapan EUDR diumumkan oleh komisi Uni Eropa. Tercatat volume ekspor sawit pada tahun 2023 turun sebesar 1,7 juta ton (35%) menjadi 3,2 juta ton dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4,9 juta ton. Turunnya permintaan asal Eropa tersebut tidak terlepas dari ketakutan importir asal negara barat karena menghindari potensi masalah dengan kepatuhan terhadap EUDR.

Walaupun ternyata bagi mereka timbul masalah baru, di mana tidak cukupnya produk minyak nabati alternatif memenuhi kebutuhan domestik industri di Eropa, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan baku karena sering kali harga minyak alternatif lebih mahal dan kurang efisien dalam produksi dibandingkan minyak sawit.

Bagi Indonesia, ancaman EUDR memang telah disikapi dengan cukup serius. Sudah lebih dari setahun, pemerintah Indonesia memperjuangkan dengan gigih bersama dengan negara produsen lain dan pelaku bisnis dari tujuh negara berkembang untuk menentang penerapan EUDR, bahkan beberapa anggota Uni Eropa (UE) sendiri ikut terlibat. Hasilnya hanyalah penundaan EUDR bukan pembatalan itu pun hanya 1 tahun.

Pasalnya, bagi perusahaan yang memasarkan produk

sawitnya ke Eropa harus berusaha maksimal mempersiapkan diri agar produknya dapat memenuhi persyaratan yang lengkap sesuai EUDR. Seperti diketahui pada Pasal 3 EUDR, dinyatakan wajibnya semua produk yang masuk ke pasar Uni Eropa telah memenuhi uji tuntas (*due diligence*) termasuk diantaranya pembuktian bahwa lokasi lahan tempat menghasilkan produk sawit tidak berasal dari hasil deforestasi sejak Desember 2020.

Untuk itu maka dipersyaratkan data geolokasi koordinat lahan. Tidak hanya untuk membuktikan terjadi deforestasi atau tidak, tetapi juga untuk membuktikan pemenuhan terhadap aspek regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti memiliki perizinan usaha, kesesuaian tata ruang, bahkan termasuk apakah berasal dari kawasan hutan atau tidak, serta peraturan lainnya yang mengikat dan berlaku.

Pemenuhan *due diligence* tersebut membutuhkan upaya serius, baik dari perusahaan maupun supplier CPO hingga supplier TBS baik dari perusahaan maupun petani. Tentunya dalam memenuhi regulasi tidak terlalu sulit bagi pihak perusahaan, tetapi bagaimana dengan petani sawit rakyat yang jumlahnya banyak. Misalnya untuk memenuhi target ekspor 1 juta ton minyak sawit (HS Code 151190), akan membutuhkan setidaknya 5 juta ton TBS yang berasal dari lahan seluas 250 ribu hektar. Jika seandainya seluruh lahan adalah milik petani maka akan melibatkan setidaknya 100 ribu bidang tanah. Artinya harus ada dokumen yang membuktikan bahwa ke-100 ribu bidang tanah tersebut memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), surat bebas kawasan hutan, dll.

Tentunya bukan hal mudah dalam melengkapi dokumen dan mengorganisir data yang begitu besar dan melibatkan stakeholder yang tidak sedikit. Dimulai dari sejumlah eksportir, produsen pabrik *refinery*, puluhan pabrik kelapa sawit penghasil CPO, hingga ratusan ribu petani pensuplai TBS. Jika 1 saja lahan milik petani berada di dalam kawasan hutan, tentu akan membuat cacat produk minyak sawit yang akan diekspor ke Uni Eropa.

Menyusun *due diligence* yang lengkap dan transparan sebenarnya mudah dilakukan jika datanya sudah tersedia. Kenyataannya, tidak semua petani memiliki izin, bahkan sebagian lahan petani masih berada dalam klaim kawasan hutan. Ini semakin mempersulit pemenuhan EUDR. Sanggupkah Indonesia dan seluruh *stakeholder* sawit memenuhinya? Itu semua tergantung pada kebijakan pemerintah, akankah penyelesaian tumpang tindih kawasan dibiarkan seperti kebijakan yang saat ini berlaku atau akan ada reforma kebijakan yang lebih tepat? Pastinya, keberlanjutan industri sawit sangat butuh dukungan pemerintah demi kesejahteraan rakyat, dan demi perekonomian bangsa. (DHP)

Limbah Cair PKS: Bagaimana Penanganan Yang Terbaik?

Peningkatan produksi kelapa sawit berdampak langsung pada meningkatnya volume limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, terutama Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang juga biasa disebut POME (*Palm Oil Mill Effluent*). Setiap ton Tandan Buah Segar (TBS) yang diproses untuk menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) akan menghasilkan sekitar 53,8% limbah cair atau setara dengan 0,538 ton. Pada tahun 2023, dengan perkiraan jumlah TBS yang diolah sebesar 250 juta ton di seluruh Indonesia, maka jumlah LCPKS yang dihasilkan, diperkirakan berkisar antara 125 hingga 150 juta ton.

LCPKS memiliki karakteristik yang sangat berpotensi mencemari lingkungan. Limbah ini berwarna kecoklatan dan mengandung padatan terlarut serta tersuspensi, seperti koloid dan residu minyak. Kandungan bahan organik dalam LCPKS sangat tinggi, dengan nilai COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) yang mencapai 68.000 ppm dan 27.000 ppm, serta pH asam (3,5 – 4). Sekitar 95% dari LCPKS adalah air, sementara sisanya terdiri dari bahan terlarut dan tersuspensi seperti selulosa, protein, lemak, serta residu minyak yang sebagian besar berupa emulsi. Kandungan TSS (*Total Suspended Solids*) LCPKS berkisar antara 1.330 hingga 50.700 mg/L, sementara logam berat seperti tembaga (Cu), besi (Fe), seng (Zn), dan amoniak ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi.

Jika tidak dikelola dengan baik, LCPKS dapat menurunkan kualitas perairan jika langsung dilepaskan ke sungai, karena menyebabkan kekeruhan, dan mengeluarkan bau tajam. Hal itu juga termasuk tindakan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mengubah LCPKS menjadi produk yang bernilai dan ramah lingkungan. Selain itu, di kolam limbah, biasanya LCPKS yang terakumulasi mengalami fermentasi dan menghasilkan biogas yang terdiri dari campuran gas CH₄ (55-60%), gas CO₂ (35-40%), dan gas-gas lain (N₂, H₂S, uap air <2%) dengan total emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 542 (kg CO₂eq/ton CPO).

Salah satu solusi utama untuk mengelola LCPKS adalah dengan menggunakan metode *Land Application* (LA). Limbah cair yang telah diproses dapat diterapkan langsung pada lahan perkebunan. Metode ini memiliki dua manfaat utama: pertama, meningkatkan kualitas tanah dengan memperbaiki struktur tanah dan, kedua, menggantikan penggunaan pupuk kimia sintetis yang mahal dan berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, metode LA dapat mengurangi emisi GRK yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, sekaligus mendukung komitmen global untuk pengurangan dampak perubahan iklim.



Ilustrasi limbah cair Perkebunan Kelapa Sawit (dok.BDPDKS)

Limbah cair juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi terbarukan, seperti bahan bakar (SAF dan Biodiesel) ataupun bioCNG yang diperoleh melalui teknologi *Methane Capture*. Proses ini menangkap gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi anaerobik limbah cair, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar Biogas untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik dan atau menjadi BioCNG. Pemanfaatan limbah ini, selain dapat mengurangi emisi, teknologi ini menciptakan peluang ekonomi baru dengan memanfaatkan kembali energi yang dihasilkan untuk digunakan pabrik sendiri atau dijual ke pasar.

Pendekatan yang lebih efisien dalam pengelolaan limbah cair tentunya perlu ditempuh dengan menggabungkan teknologi *hybrid*, yang mengkombinasikan metode LA, MC, dan pengolahan biologis. Limbah cair yang telah diproses melalui teknologi ini dapat diubah menjadi produk bernilai, seperti pupuk cair, biogas, dan air olahan yang aman bagi lingkungan. Teknologi *hybrid* ini menawarkan solusi holistik untuk mengelola limbah cair secara efisien, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), sangat mendukung pemanfaatan gas metana dari LCPKS. Sebab, jika total emisi GRK dari seluruh PKS di Indonesia yang diperkirakan sebesar 36 juta ton CO₂ dilepaskan ke atmosfer dapat menambah dampak pemanasan global. Akan tetapi apabila dimanfaatkan tentu dapat menghasilkan energi dan bahan bakar terbarukan yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Untuk itu, dikatakan KLH mempersiapkan skema insentif dan disinsentif untuk mendorong industri sawit mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke ekonomi rendah karbon.

Oleh karena itu, pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit melalui berbagai pendekatan ini dapat dianggap sebagai solusi terbaik dalam mengurangi dampak lingkungan sambil memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. (SN)

Meningkatkan Efektivitas PSR, Mungkinkah?

Program B50 yang baru-baru ini ditargetkan Presiden Prabowo tampaknya bakal terbendung hambatan keterbatasan produksi. Pasalnya, produksi CPO nasional tahun 2024 ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dan diprediksi tahun 2025 juga tidak akan terjadi peningkatan produksi yang signifikan. Sebab, semua upaya masih berjalan seperti biasa (*business as usual*), termasuk Program PSR dan intensifikasi lainnya.

Program PSR yang seyogyanya ditargetkan 180 ribu hektar per tahun, tampaknya sulit tercapai. Sebab secara historis, capaian PSR hanya 30% dari total akumulasi sejak 2016. Dari hasil peremajaan tahun 2016 s.d 2020 yang saat ini sudah memasuki usia TM sekitar ± 200 ribu hektar diharapkan dapat berkontribusi pada kenaikan produksi, sekitar 1 ton per hektar, atau setara dengan 200 ribu ton CPO setahun.

Seandainya, setiap tahun dapat diremajakan area sebesar 180 ribu hektar, maka dalam 4 tahun yang akan datang akan terjadi kenaikan produksi sawit nasional sekitar 150-180 ribu ton dari sawit rakyat dan seiring dengan waktu produksinya akan terakumulasi meningkat.

Program PSR memiliki potensi besar mendukung kenaikan produksi, namun implementasinya belum berjalan mulus. Berbagai tantangan terus menghambat, mulai dari sisi permohonan yang terhambat administrasi yang tidak lengkap, minimnya partisipasi pekebun hingga kelembagaan pekebun yang kurang akomodatif. Di mana banyak pekebun yang menghadapi hambatan administratif namun tidak mendapat support yang proper oleh Lembaga, sehingga membuat pekebun kehilangan minat untuk mengikuti program PSR.

Setidaknya itu, beberapa temuan IPOSS dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari FGD, survei dan analisis data kualitatif dan kuantitatif.

Pada intinya, ekosistem yang saat ini dibangun pemerintah dalam hal ini BPDPKS, Kementerian Pertanian, hingga pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan partisipasi pekebun dan keberhasilan program PSR. Sebab, tata Kelola yang ada, belum mampu mendorong akselerasi program, bahkan diduga menimbulkan hambatan dalam realisasi PSR. Misalnya setiap timbulnya permasalahan di lahan pekebun, belum ada pihak yang mampu membuat terobosan penyelesaian yang tuntas.

Maka, dapat dikatakan dalam percepatan program PSR, sebenarnya perlu hadirnya lembaga atau entitas yang secara khusus mengontrol realisasi program PSR secara



Ilustrasi bibit sawit (dok.RRI)

menyeluruh. Entitas tersebut hendaknya solid, didukung regulasi yang teguh dan tindakannya memiliki kepastian hukum, membuat pekebun merasa nyaman untuk bergabung.

Entitas tersebut dapat mendorong agar sosialisasi dan pendampingan yang tadinya dirasakan kurang memadai, dapat ditingkatkan efektivitasnya. Juga dapat menjembatani kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga sehingga penyelesaian atas legalitas lahan sawit yang diklaim berada dalam kawasan atau tumpang tindih HGU akan mendapat solusi yang cepat dan murah. Juga dapat memberi bimbingan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) peremajaan yang lebih presisi.

Masalah ini mengarah pada kebutuhan untuk membentuk entitas atau lembaga negara yang khusus untuk mengontrol program PSR secara menyeluruh. Setiap persoalan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat, dapat segera diberikan pendampingan dan teratasi baik pada tahap pengajuan, implementasi, hingga *monitoring*. Adopsi program PIR-Trans yang pernah dibentuk pada saat pemerintah mengelola program transmigrasi dapat dijadikan contoh kelembagaan lintas K/L yang sukses menyelesaikan permasalahan antar kelembagaan.

Dengan hadirnya lembaga tersebut, sosialisasi, koordinasi dan implementasi PSR akan lebih efektif. Peremajaan sawit akan dengan mudah dilakukan secara sistematis, terukur, dan menyeluruh dengan mutu pekerjaan yang memenuhi standar *Good Agricultural Practices* (GAP). Maka, produksi sawit dari hasil PSR berpotensi besar dapat memenuhi harapan pemerintah dalam Program B50 hingga bahkan B100. Keberhasilan PSR tidak hanya berdampak pada peningkatan ketersediaan feedstock biodiesel, tetapi juga mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit secara menyeluruh. (DS, Dhp)

Transformasi BPDPKS menjadi BPDP: Apa Ya Dampaknya?

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selama ini memainkan peran strategis dalam mendukung industri kelapa sawit Indonesia melalui dukungan pembiayaan berbagai program seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), subsidi biodiesel, dan program lain yang positif untuk ekosistem sawit. Namun, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 yang mentransformasi BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah memberikan tantangan tersendiri, khususnya bagi industri sawit. Seperti apa ya dampaknya?

Transformasi BPDPKS menjadi BPDP memperluas cakupan pengelolaan dana, dari yang awalnya hanya untuk kelapa sawit, kini juga mencakup kakao dan kelapa. Harapannya agar keberlanjutan produk ini tidak tertinggal jauh dari kelapa sawit, mengingat perannya yang sama-sama signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan apakah kebijakan ini akan memperkuat industri perkebunan secara menyeluruh, atau malah justru berisiko memperlemah posisi sawit yang saat ini menjadi tulang punggung perkebunan.

Pemerintah menyatakan bahwa saat ini produktivitas kakao dan kelapa sangat rendah. Faktanya, memang luas lahan kakao dan kelapa yang berstatus Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) sangat tinggi apabila dibandingkan dengan sawit. Lahan yang masuk ke dalam golongan TTM adalah lahan dengan tanaman tua yang sudah tidak produktif, serta lahan yang rusak karena hama, bencana, ataupun faktor lain. Menurut data Dirjenbun pada tahun 2022, persentase luas lahan TTM adalah sebesar 20,4% untuk kakao dan 11,3% untuk kelapa. Sementara itu, lahan TTM sawit hanya sebesar 3,5%. Idealnya, peremajaan lahan TTM harus segera dilakukan.

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kakao dan kelapa adalah dengan mengadaptasi program PSR. Program PSR memanfaatkan dana yang berasal dari pungutan ekspor (PE) kelapa sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Pemerintah telah merencanakan pengenaan PE pada kakao dan kelapa, yang nantinya akan dikelola oleh BPDP. Mengingat saat ini, untuk ekspor biji kakao hanya dikenakan bea keluar (BK),

sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan apapun.

Dengan asumsi program peremajaan kakao membutuhkan biaya 60 juta/ha dan kelapa 30 juta/ha, dengan target peremajaan 4% dari total luas lahan perkebunan rakyat per tahun. Maka diperhitungkan, kebutuhan dana peremajaan kakao sebesar 3,39 triliun rupiah dan 3,96 triliun rupiah untuk kelapa. Sementara itu, dengan asumsi PE mengikuti PE produk sawit sebesar 7,5% untuk produk mentah dan 6,0% untuk produk turunan, diperkirakan jumlah penerimaan BPDP dari PE untuk kakao adalah sebesar 2,3 triliun rupiah dan untuk kelapa adalah 1,8 triliun rupiah. Sehingga, penerimaan BPDP dari kakao tidak akan cukup untuk membiayai peremajaannya sendiri, begitu pula kelapa.

Peningkatan tarif PE mungkin dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Sayangnya, hal itu berpotensi mengurangi pendapatan di tingkat petani. Namun, jika tidak ada penyesuaian tarif PE, sangat memungkinkan terjadi pendanaan lintas komoditi atau subsidi silang dari dana sawit. Namun, pendekatan subsidi silang ini berisiko menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan dana antar-komoditas.

Sehingga, langkah yang paling memungkinkan untuk diterapkan oleh BPDP adalah mengarahkan skema pembiayaan mandiri untuk program peremajaan kakao dan kelapa. BPDP dapat menyesuaikan target luas lahan peremajaan, sesuai dengan kemampuan pembiayaan masing-masing komoditas. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pengurangan besaran bantuan per hektar peremajaan.

Dalam mengelola ini, BPDP dapat membentuk business unit yang berfokus pada masing-masing komoditas. Penerimaan dari komoditas tertentu hanya akan dimanfaatkan untuk komoditas tersebut, tanpa adanya pembiayaan lintas subsidi.

Melalui pendekatan yang lebih tersegmentasi ini, BPDP dapat tetap menjadi instrumen yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat mendukung keberagaman komoditas tanpa mengorbankan sawit yang selama ini menjadi pondasi utama dalam menopang sektor perkebunan Indonesia. (RFY)



Ilustrasi Kelapa Sawit dan Kelapa (dok.MedPerkebunan)

COP 29: Rewetting Gambut Solusi Keberlanjutan di Lahan Sawit



Ilustrasi Kebun Sawit (dok. BDPKPS)

Indonesia memiliki lahan gambut seluas 13,43 juta hektar yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang tidak terdekomposisi sempurna selama ratusan hingga ribuan tahun. Hal ini menyebabkan lahan gambut sangat berongga dengan tingkat porositas 70-90%, jauh lebih tinggi dibandingkan tanah mineral yang hanya 48-70%. Tingginya porositas membuat air dapat dengan mudah terserap masuk ke dalam tanah gambut. Dengan ketebalan rata-rata 3 meter, gambut dapat menyimpan cadangan air serta karbon yang besar. Berdasarkan PP 57/2016, pembasahan atau *rewetting* lahan gambut wajib dilakukan untuk menjaga fungsi hidrologisnya. Gambut yang kering berpotensi penurunan permukaan lahan gambut (subsidence), kebakaran, dan hilangnya fungsi agronomis, sehingga *rewetting* diperlukan untuk melestarikan ekosistem, terutama di perkebunan kelapa sawit.

Moratorium pembukaan lahan gambut untuk kelapa sawit diterapkan sejak penerbitan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur penundaan pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Penundaan izin ini diperpanjang hingga 2019, kemudian menjadi kebijakan pelarangan izin permanen hingga saat ini. Kebijakan ini berlaku tentu saja bagi perusahaan sawit yang ingin membuka perkebunan di lahan gambut sejak 2011. Dalam kondisi ini, kebijakan pengelolaan berkelanjutan menjadi prioritas untuk memastikan praktik budidaya kelapa sawit di lahan gambut tetap memenuhi prinsip keberlanjutan dan menjaga ekosistem.

Pengelolaan gambut yang tidak tepat, seperti drainase berlebihan, dapat menyebabkan gambut memadat dan mengering secara tidak terbalikkan (*irreversible drying*). Hal ini memicu subsidensi tanah yang menyebabkan lahan menjadi tidak layak, baik secara agronomis maupun ekonomis di masa yang akan datang. Dampaknya meluas, mulai dari penurunan kualitas hara tanah, meningkatnya risiko kebakaran, hingga pelepasan emisi karbon yang signifikan. Gambut yang rusak juga mengancam capaian

keberlanjutan kelapa sawit, baik dari sisi lingkungan maupun produksi.

Rewetting gambut adalah strategi kunci untuk menjaga fungsi hidrologis lahan gambut, melalui pembangunan sekat kanal dan pintu air, dengan tinggi muka air tanah yang dipertahankan pada level 40–50 cm di bawah permukaan. Hal ini mencegah pengeringan berlebih yang menyebabkan subsidensi tanah, kebakaran lahan, dan pelepasan emisi karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup di COP 29 yang diselenggarakan di Baku pada November 2024 lalu memaparkan pentingnya *rewetting* pada lahan gambut karena mampu menurunkan emisi CO₂ dari 39.5 menjadi 33 tCO₂ per hektare per tahun. Langkah pembasahan gambut ini mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. *Rewetting* juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dengan *rewetting* tanah gambut akan lebih terjaga fungsi hidrologisnya, sebab air dipertahankan berada pada ketinggian 0,4–0,6 dari permukaan tanah. Secara agronomis, pekebun tetap dapat bekerja memanen, merawat tanaman dan mengangkut hasil produksi dengan kendaraan berbobot ringan. Produktivitas sawit pun dapat mencapai 24 ton TBS per hektar per tahun. Bagi sebagian perkebunan yang menerapkan *rewetting*, gambut akan lebih terpelihara, tidak mudah terbakar dan produktivitas akan tinggi bahkan untuk lebih dari 4 generasi. Tentunya, keberhasilan *rewetting* ini tidak terlepas dari *water management* yang proper dan konsisten.

Water management yang baik dapat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan produksi. Langkah ini juga menjawab tekanan internasional yang menyoroti isu lingkungan dalam sektor kelapa sawit, terutama terkait dengan pemanfaatan gambut untuk perkebunan sawit. Bahwa sawit tetap dapat dibudidayakan di lahan gambut, sepanjang *water management* diterapkan dengan proper. Pengelolaan ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekebun kecil, untuk memastikan kelapa sawit di lahan gambut dapat menjadi aset strategis tanpa mengorbankan keberlanjutan. (MA)

IPOSS NEWS
INDONESIA PALM OIL STRATEGIC STUDIES

Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP, Ahmad Mina**,
Staf Redaksi: **Dwivayani, Farid, Raisya, Aura, Sylvia**
Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id